

**Judul** : Demokrasi Terancam Mundur  
**Tanggal** : Sabtu, 13 Mei 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 1

# Demokrasi Terancam Mundur

*Wapres secara tegas meminta proses revisi UU TNI tidak mencederai semangat reformasi.*

**RIFALDI PUTRA IRIANTO**  
[rifaldi@mediaindonesia.com](mailto:rifaldi@mediaindonesia.com)

INDONESIA saat ini dalam ancaman kemunduran demokrasi. Perilaku sembrono yang kerap ditunjukkan pihak eksekutif maupun legislatif dalam mengeluarkan kebijakan beberapa waktu terakhir disebut menjadi salah satu pemicu kemungkinan kemunduran tersebut.

Dalam kacamata pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, kondisi tersebut bahkan membuka ancaman bangkitnya otoritarianisme. "Indonesia sedang mengalami *set back* sangat serius karena kecenderungan perilaku melanggar etika, norma, serta hukum semakin menjadi-jadi," ucap Siti dalam keterangannya, kemarin.

Ia menyebut munculnya *omnibus law* Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan hingga rencana revisi Undang-

Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi contoh bukti bahwa demokratisasi di negeri ini sedang berjalan mundur. Begitu pula sejumlah RUU lain yang dalam proses pembentukannya menjadi UU kontroversial. Meskipun dalam pembahasannya mendengarkan pendapat pihak eksternal, suara mereka seperti diabaikan.

Ia menyebut, jika kondisi itu dibiarkan, demokrasi Indonesia dikhawatirkan bakal tinggal nama. Seolah-olah demokrasi, tetapi substansinya tidak demokratis.

"Masyarakat sipil harus bersatu melawan kesewenangan yang ditunjukkan melalui UU dan kebijakan-kebijakan yang tidak memperhitungkan kemaslahatan bangsa," tukasnya.

Dalam kesempatan lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut angkat bicara terkait dengan polemik revisi UU TNI. Wapres tegas meminta proses revisi UU TNI tidak mencederai

semangat reformasi.

"Silakan dibicarakan selama tidak herbicara dwifungsi," kata Ma'ruf saat memberikan keterangan pers di Ternate, Maluku Utara, kemarin.

Mengenai adanya wacana penambahan jabatan sipil yang bisa diisi perwira TNI aktif, Wapres menekankan agar ide itu dibicarakan matang dulu agar tidak membuka kemungkinan hidupnya dwifungsi militer.

Senada, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpendapat UU No 34/2004 sudah berjalan baik. Karena itu, menurutnya, kajian untuk merevisi UU TNI tidak mendesak. "Saya pikir yang ini sudah berjalan dengan baik."

## Baru usulan

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut rencana revisi UU TNI masih sebatas rencana yang sedang digodok tim khusus di Mabes TNI. Penggodokan itu diperkirakan membutuhkan waktu yang panjang sebelum akhirnya dibahas di DPR bersama pemerintah.

"Usulan itu juga belum tentu diterima di Kementerian Per-

## Usulan Revisi Pasal yang Dikhawatirkan

- **Pasal 47 ayat 2:**  
Prajurit TNI hanya bisa menduduki jabatan di 10 kementerian atau lembaga.
  - **Usulan:**  
Prajurit TNI bisa menduduki jabatan di 18 kementerian atau lembaga.
  - **Pasal 65 ayat 2:**  
Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.
  - **Usulan:**  
Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan hukum pidana umum.
  - **Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2**  
**Ayat 1:** TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.  
**Ayat 2:** Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan.
  - **Usulan:**  
**Ayat 1:** TNI dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.  
**Ayat 2:** Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan.
- Tanggapan TNI**
- Membantah revisi UU TNI berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI dan mengkhianati semangat reformasi.
  - Dalam berdemokrasi pun ada sejumlah kebutuhan personel TNI di dalam kementerian sipil.



Sumber: Litbang MI

tahanan karena prosedurnya akan dibentuk panitia kerja (panja) dari pihak pemerintah, baru kemudian draf itu disempurnakan dan dikirim ke DPR. Jadi itu baru usulan dari TNI kepada panja pemerintah," ujarnya, kemarin.

Ketika nantinya rancangan itu disetujui dan dikirim ke DPR untuk dibahas, Hasanuddin menyatakan siap membahasnya secara terbuka. "Mari kita bahas mana klausul yang bermasalah," tegasnya.

Ia mengaku mengkritisi antara lain usulan soal anggaran TNI yang tidak lagi di bawah Kementerian Pertahanan, tapi langsung ke Kementerian Ke-

uangan.

Hasanuddin meminta TNI dan Kemenhan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi mengenai anggaran tersebut sehingga tidak terjadi pola pikir sektoral yang buntutnya ialah merevisi undang-undang.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan revisi UU TNI punya dasar yang kuat, yakni berdasarkan amanat UU Cipta Kerja.

Namun, ia menyebut aturan itu belum final dan berjanji menampung aspirasi publik terkait dengan revisi UU tersebut. (Sru/Che/MGN/X-3)